

ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan zaman maka perkembangan urusan publik semakin kompleks dan beragam. Informasi publik tersebut sangat dibutuhkan oleh warga negara untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan potensi hidup setiap warga negara. Informasi ekonomi, sosial, politik, dan hukum merupakan informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap warga negara karena dengan informasi tersebut warga negara dapat mengetahui mengembangkan potensi untuk mempertahankan hidup mereka. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemberian informasi publik terkadang adanya permasalahan bahwa badan publik yang memiliki informasi publik tidak memberikan informasi publik atau memberikan informasi publik tidak sesuai harapan dari pemohon informasi sehingga berdampak ketidakpuasan pemohon informasi. Hal tersebut menimbulkan Sengketa Informasi Publik.

Sengketa Informasi Publik diselesaikan pada tahapan melalui Komisi Informasi dengan cara Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi. Penyelesaian oleh Komisi Informasi tersebut terkadang tidak memuaskan para pihak sehingga terdapat keberatan atas putusan komisi informasi. Atas keberatan putusan komisi informasi tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal tersebut sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa informasi.

ABSTRACT

In line with the times, the development of public affairs increasingly complex and diverse. The public information is needed by citizens to preserve life and to develop the potential life of every citizen. Information of economic, social, political, and legal is very important information and are needed by every citizen because with the information citizens can know to develop their potential to sustain life. In the implementation of public service provision of public information sometimes their permasalahan that public bodies have a public information does not provide public information or public information does not match the expectations of the applicant information, which leads to dissatisfaction applicant information. This raises a Public Information Dispute.

Public Information Dispute completed in stages through the Information Commission by way of Mediation and Adjudication litigation. Completion by the Information Commission sometimes does not satisfy the parties so that there is an objection to the decision of the commission information. Over the objections of the commission's decision that information can be submitted a claim to the State Administrative Court (Administrative Court). It is, as the mandate of Law Number 14 of 2008 on Public Information which authorizes the State Administrative Court to resolve the dispute information.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan, atas kasih sayang dan limpahan berkat serta kuasa-Nya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis dengan judul “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik, ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Studi Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Saya menyadari bahwa selesainya penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan yang begitu besar dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan selama ini.
2. Bpk. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan pengarahan guna terselesainya penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr.Lany Ramli, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.

5. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., MH. sebagai penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Orang tua tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Istri yang tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian tesis ini.
9. Teman-teman Magister Hukum Pemerintahan, yang banyak membantu dan turut memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Bapak Ketua PTUN Makasar dan Wakil Ketua PTUN Makasar serta seluruh rekan rekan calon hakim PTUN Makasar yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini semoga amal baik semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis mengharapkan tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum administrasi dan seluruh pembaca. Penulis mohon maaf kalau dalam penulisan ini terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan masukan dan koreksi guna menambah pengetahuan bagi penulis

Surabaya, Februari 2014

Penulis

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H.

